

## **Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung**

**Christhian Rame**

**I Gusti Putu Nata Wirawan**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNiversitas Udayana

### **ABSTRAK**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah merubah sistem pemerintahan khususnya dibidang pendanaan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi daerah akan lebih mampu pemberian pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010; (2) untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung tahun 2001-2010; (3) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pajak hiburan. Teknik analisis yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi dan Regresi Linear Sederhana Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung tahun 2001-2010 rata-rata sebesar 121,84 persen. (2) efisiensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung tahun 2001-2010 rata-rata sebesar 5,88 persen. (3) Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah

### **ABSTRACT**

Application of Law Number 32 Year 2004 about area autonomy. Policy of area autonomy placing town and sub-province as autonomous emphasis likely promise better expectation to area to be able to develop center diri. Pemerintah give broader kewenangan to local government in managing its area as according to condition of society aspiration and region. Autonomous also give expectation to society to be able to enjoy service of better public, climate creation democratize in area, and also peep out new expectation to society to be able to obtain; get polycys of more making account of area of society chance. In this research of research obyek is acceptance of entertainment amusement lease in Sub-Province of Badung Year 2001-2010. Data the used is data of sekunder obtained of institutions which related to entertainment amusement lease. Analysis technique the used is efektivitas, Simple Linear Regression and efisiensi. Pursuant to result of solution can be concluded that (1) effectiveness acceptance of entertainment amusement lease in Sub-Province of Badung year 2001-2010 mean equal to 121,84 %. (2) efisiensi acceptance of entertainment amusement lease in Sub-Province of Badung year 2001-2010 mean equal to 5,88%. 3) Acceptance of lease Entertainment amusement have influence which are positive and signifikan to PAD in Sub-Province of Badung Year 2001-2010.

**Keyword:** Acceptance of lease Entertainment amusement and Earnings of Genuiness Area

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kuncoro (2006:14), kebijakan otonomi daerah yang menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya menjanjikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas di daerah, serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk dapat memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Badung untuk 10 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi pasang surut karena dalam 2 tahun kebelakang ini yakni tahun 2000 dan tahun 2003 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun cukup drasris. Hal ini disebabkan karena pengaruh global yaitu adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sebagai dampak dari tragedi kemanusiaan Bom di WTC New York (USA), penyebaran virus Sars yang mewabah di beberapa belahan dunia dan tragedi bom di Legian Kuta (Bali).

Sebagai pusat pariwisata, pajak hiburan di Kabupaten Badung tergantung dari pada jumlah kedatangan wisatawan dan juga perkembangan potensi ekonomi yang di tunjukan oleh meningkatnya PDRB.

Biaya pengelolaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung selama tahun anggaran 2001-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel. 1** Biaya Pengelolaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2001-2010

Tahun	Biaya Pengelolaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rupiah)	Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan (%)
2001	115.762.898	2.337.842.134	-
2002	217.461.704	4.000.276.824	20,10
2003	245.633.849	3.563.219.933	42,22
2004	257.715.000	4.318.021.087	45,32
2005	676.664.000	5.540.443.802	28,31
2006	270.993.000	4.960.959.534	-10,46
2007	309.648.000	6.270.135.418	26,39
2008	292.409.000	9.419.086.720	50,22
2009	609.101.137	12.182.202.749	29,34
2010	691.409.946	13.828.188.934	13,51

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa biaya pengelolaan di Kabupaten Badung pada tahun 2004 sebesar 257.715.000 mengalami peningkatan pada tahun 2005 yaitu sebesar 418.949.000 tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 270.993.000. Realisasi pada tahun 2004 sebesar 4.318.021.087 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010 sebesar 13.828.188.934.

### Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung 2001-2010?
- 2) Bagaimanakah tingkat efisiensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung 2001-2010?
- 3) Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Badung?

### **Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efesiensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010
- 3) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten Badung.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

### **Pengertian Pajak**

Menurut Shaviro (2008), menjelaskan bahwa perpajakan sebaiknya meningkatkan dua tujuan yang sinergi yaitu pengalokasian beban pembayaran yang efisien kepada pemerintah dan mendapatkan hasil distribusi yang diinginkan dari kedua belah pihak yaitu antara si pembayar pajak dengan pemerintah.

### **Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

### **Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan**

Efektivitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk mewujudkan suatu rencana atau target, artinya seberapa mampu suatu unit atau lembaga untuk mewujudkan target yang direncanakan. Apabila hasil menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi semakin efektif. Demikian sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya pengelolaan retribusi semakin tidak efektif.

### **Efesiensi Penerimaan Pajak Hiburan**

Menurut Osborne (1997: 389), mengatakan bahwa efesiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing input output. Ketika mengukur efesiensi akan diketahui berapa banyak biaya yang ditanggung untuk mencapai hasil tertentu. Beberapa cara untuk meningkatkan efesiensi adalah output dan input yang sama atau dengan output dengan proporsi yang besar kenaikan input yang proposional atau juga dengan proposional yang besar dan menurunkan output secara proposional.

### **Pengaruh Pajak Hiburan Dengan Pajak Asli Daerah**

Pengaruh pajak daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) dengan pajak hiburan merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari pajak hiburan. Dengan meningkatnya pajak hiburan akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan, selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali.

Hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Nyoman Suartini dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Hiburan Terhadap PAD di Kabupaten Giayar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991 -2010. Dari nilai koefisien regresi terstandar menunjukkan nilai variable PHR tertinggi, maka dapat disimpulkan PHR memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD Kabupaten Gianyar.

Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Ari Trisnadewi dengan judul “Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam PAD di Kabupaten Badung tahun anggaran 2000-2004”. Hasil dari penelitian tersebut, pertumbuhan pajak, retribusi dan PAD mengalami fluktuasi, rasio pertumbuhan pajak dan retribusi daerah tahun 2002-2003 mengalami penurunan. Untuk kontribusi PAD, pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar dari komponen PAD lainnya termasuk retribusi daerah. Dilihat dari rasio efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah mencerminkan kinerja yang baik untuk efisiensi di bawah 60% dan untuk efektivitas di atas 100%.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung dengan pertimbangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung selama periode waktu tahun 2001 hingga tahun 2010 secara umum mengalami fluktuasi, dan pajak hiburan sebagai salah satu komponen PAD juga memiliki peran yang relatif penting terhadap PAD kabupaten Badung.

### **Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010.

#### **Jenis dan Sumber Data**

##### **Jenis Data Menurut Sifatnya**

- 1) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang meliputi target dan realisasi pajak hiburan, komponen pajak daerah serta biaya pengelolaan pajak hiburan.
- 2) Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka tetapi berupa keterangan-keterangan, mengenai variabel-variabel yang diteliti ini antara lain berupa uraian-uraian penjelasan-penjelasan perundang-undangan dan keterangan sumber pendapatan daerah.

##### **Jenis Data Menurut Sumbernya**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data deret waktu dari tahun 2001-2010.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **1) Observasi**

Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap data-data yang diperlukan pada instansi yang terkait khususnya Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

#### **2) Studi pustaka**

Yaitu memperoleh data atau informasi yang sifatnya tertulis (data sekunder) yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis efektivitas penerimaan pajak hiburan

Untuk mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target penerimaan pajak hiburan. Menurut Mardiasmo dan Makhfathih (2005:5), untuk menghitung efektivitas tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis efesiensi penerimaan pajak hiburan

Analisis efesiensi digunakan untuk mengukur bagian dari realisasi penerimaan pajak hiburan yang digunakan dalam menutup biaya pungutan. Bila biaya pungutan dapat ditekan serendah mungkin, maka nilai akan menjadi lebih besar. Menurut Mardiasmo dan Makhfathih (2005:5), untuk menghitung efesiensi tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pajak asli daerah Kabupaten Badung di gunakan teknik analisis regresi linier sederhana, menurut Nata Wirawan (2001) digunakan rumus regresi linier sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta \cdot X_t + \mu_t \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- $Y_t$  = PAD Kabupaten Badung pada tahun t
- $X_t$  = Penerimaan pajak hiburan pada tahun t
- $\alpha$  = Intersep (konstanta)
- $\beta$  = Koefisien regresi
- $\mu_t$  = Residual pada tahun t

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 121,84 persen maka tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas sebesar 158,52 persen yaitu tergolong sangat efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2001 sebesar 158,52 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah realisasi tahun 2001 lebih besar dari peningkatan jumlah target yang ditetapkan pada tahun tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat efektivitas terjadi pada tahun 2006 sebesar 101,90 persen ini disebabkan karena jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah target yang telah ditetapkan. Tahun 2006, target yang ditetapkan pemerintah hanya meningkat sebesar 1,40 persen. Penganggaran target oleh pemerintah berdasarkan atas situasi yang dialami oleh wilayahnya dan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga penerimaan pajak tahun 2006 mengalami penurunan karena isu yang terjadi pada tahun 2005 yaitu bom Bali II dan isu flu burung yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali. Walaupun demikian, penurunan tingkat efektivitas pada tahun masih tergolong sangat efektif

### Tingkat Efesiensi Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Badung

Rata-rata tingkat efesiensi penerimaan pajak hiburan menunjukkan sebesar 5,88 persen dan dapat dikategorikan sangat efesien. Pada tahun 2006 terjadi penurunan efesiensi sebesar 0,88 persen yang disebabkan oleh terjadinya kenaikan biaya-biaya yang meliputi biaya pemeriksaan surat Pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD) pajak hiburan, biaya pendaftaran wajib pajak hiburan, biaya penangihan pemeliharaan basis data, biaya

pelaksanaan perhitungan pajak hiburan, biaya penaguihan pajak hiburan, biaya monitoring hiburan yang bersifat tetap maupun insidentil dan biaya monitoring tunggakan pajak hiburan. Namun peningkatan biaya tersebut diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan walaupun terjadi peningkatan biaya pada tahun 2005 masih tergolong sangat efisien.

Pada tahun 2007 terdapat peningkatan biaya pemungutan pajak hiburan, biaya bimbingan teknis dan penyuluhan tentang pajak hiburan, biaya pemeriksaan SPTPD pajak hiburan, biaya monitoring pajak hiburan, biaya administrasi penerimaan pajak hiburan, dan penambahan biaya monitoring pendataan wajib pajak hiburan sehingga biaya pada tahun 2007 meningkat dibandingkan pada tahun 2006.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap biaya-biaya menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan basis data tahun 2005 meningkat sebesar 58,65 persen. Sehingga dapat dilihat pada tahun 2006 tidak terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan basis data. Adapun biaya pemungutan pajak sebesar 5% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

### **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung**

Berdasarkan hasil uji  $t_{hitung} = (10,743) > t_{tabel} = (1,860)$  maka  $H_0$  ditolak sebaliknya  $H_1$  diterima, ini berarti penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak hiburan memiliki peran yang relatif penting terhadap PAD Kabupaten Badung, dan hasil ini juga di perkuat dengan hasil penelitian sebelumnya Ni Nyoman Suartini yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya  $b = 69,404$  artinya bila penerimaan pajak hiburan meningkat 1 milyar rupiah maka akan menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 69,404 milyar rupiah dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

- 1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa rata-rata 121,84 persen maka tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas sebesar 158,52 persen yaitu tergolong sangat efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2001 sebesar 158,52 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah realisasi tahun 2001 lebih besar dari peningkatan jumlah target yang ditetapkan pada tahun tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat efektivitas terjadi pada tahun 2006 sebesar 101,90 persen ini disebabkan karena isu yang terjadi pada tahun 2005 yaitu bom Bali II dan isu flu burung yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali.
- 2) Tingkat efisiensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010 menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi penerimaan pajak hiburan menunjukkan sebesar 5,88 persen dan dapat dikategorikan sangat efisien. Pada tahun 2006 terjadi penurunan efisiensi sebesar 0,88 persen yang disebabkan oleh terjadinya kenaikan biaya-biaya penerimaan pajak seefisien mungkin sehingga peningkatan biaya tersebut diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan.
- 3) Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung.

### **Saran**

- 1) Pemerintah Kabupaten Badung dapat mengelola penerimaan pajak daerah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan dalam menentukan target dan realisasi dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

- 2) Pemerintah Kabupaten Badung lebih intensif dalam mengontrol pengelolaan biaya-biaya dalam pajak daerah sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

## REFERENSI

- Ari Maharani Ni Nyoman. 2007. Penilaian Kinerja Untuk Penerimaan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran & pajak reklame berdasarkan value For Money Audit pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Badung Tahun 2001-2005. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2011. Badung Dalam Angka Denpasar
- Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 2008. Pedoman Penulisan Skripsi Usulan Penelitian, Skripsi dan Mekanisme Pengujian. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Hafidz Sularso. 2011. Effect of Financial Performance Against Capital Expenditure Allocation and Economic Growth District / Municipality in Central Java. *Journal of Development Economics*.
- Hakki, D. 2008. Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Koswara. 2001. Analisis Kemandirian Keuangan Kabupaten Dalam Menghadapi UU no.25 tahun 1999. Tesis S2. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Mardian Santoso. 2008. Factors Affecting Revenue Regional Tax and Retribution in Depok At regional autonomy. *Journal of Development Economics*
- Nata Wirawan. 2001. Statistik 1 (statistik Deskriptif). Edisi Kedua. Denpasar: Kararas Emas
- Osborne, 1997. Pendapatan Asli Daerah Ramka Otonomi Dalam Daerah. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Rina Rahmawati Ruswandi. 2007. Analysis of the Effect of Local Tax Revenue in Sumedang District. *Journal of Development Economics*.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta.
- Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Edisi Keenam: Salemba Barat. Jakarta
- Widiada. 2006. Analisis Potensi Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung. Tesis S2. Program Pasca Sarjana UNUD. Denpasar.